

Membangun Manggarai Barat Dari Desa Melalui Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia

Marius Yosef Seran¹, Septian Hutagalung², Reynaldo Siagian³

¹Prodi Ekowisata, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, rioseran19@gmail.com

²Prodi Ekowisata, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, septian.hutagalung@poltekelbajo.ac.id

³Prodi Manajemen Pemasaran Internasional, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, reynaldoangga@poltekelbajo.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the development of villages of Manggarai Barat Regency through the increasing of it human resources. This research uses a qualitative research method which the key informant comes from representative's stakeholder, such an academicians, business and industries, community, local government, chief of villages, and mass media. As a tools of data collection, this study uses field observations, forum group discussion, and literature studies. SWOT Matriks Analysis also uses as data analyzing technique. The result of the study showed that there are numbers of strengths, weaknesses, opportunities, and potential threats that interfere the whole process of human resources development process. Therefore, it is recommended that stakeholders need to make a better and strong coordination in order to ensure that any strategic-follow-up plans can be implemented properly and efficiently.

Keywords: Human resources, Village planning and development, Stakeholder's participation, Stakeholder's collaboration, Strategic-follow-up plan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan desa di Kabupaten Manggarai Barat melalui peningkatan sumber daya manusia. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan informan-informan kunci adalah pemangku kepentingan terkait, yakni akademisi, pelaku usaha dan industri, perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, kepala desa, serta pers atau media. Penelitian ini menggunakan observasi lapangan, forum diskusi terpumpun dan kajian literatur sebagai teknik pengambilan data. Analisis data menggunakan matrik analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi ancaman yang dapat mengganggu seluruh proses pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini agar para pemangku kepentingan terkait perlu melakukan koordinasi yang semakin baik dan kuat dalam upaya untuk memastikan agar setiap rencana tindak lanjut strategis dapat diimplementasikan dengan tepat dan efisien.

Kata kunci: Sumber daya manusia, Perencanaan dan pembangunan desa, Partisipasi pemangku kepentingan, Kolaborasi pemangku kepentingan, Rencana tindak lanjut strategis.

PENDAHULUAN

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas adalah salah satu misi dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat periode 2021 sampai dengan 2024. Misi ini dijabarkan lebih lanjut dalam rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2021-2026, dimana usaha mewujudkan SDM berkualitas terbagi ke dalam beberapa sasaran dan indikator pengukuran, yakni: pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bertujuan untuk mengukur kualitas dan daya saing SDM; kedua, Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) yang bertujuan untuk mengukur isu kesetaraan gender; ketiga, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mengukur akses, kualitas dan daya saing pendidikan; keempat, Angka Harapan Hidup (AHH) dan Prevalensi Stunting yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat derajat kesehatan masyarakat; kelima, Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur tingkat keberdayaan perempuan dan anak. Hal ini didukung lagi dengan arah kebijakan tahunan, khususnya di tahun 2025, yang berfokus kepada penguatan kapasitas SDM yang berkualitas dan berkarakter.

Berdasarkan statistik kunci 2019-2021 dari BPS Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut:

Rincian/Description	Satuan/Unit	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousands	274,6	256,3	259,5
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	2,10	1,41	1,27
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	-	-	-
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	96,71	95,89	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² <i>Labour Force Participation Rate-LFPR²</i>	%	71,34	78,52	73,18
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² <i>Unemployment Rate-UR²</i>	%	-	3,72	4,94
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	ribu/thousands	49,23	49,40	51,15
Persentase Penduduk Miskin ⁴ <i>Percentage of Poor People⁴</i>	%	18,01	17,71	17,92
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ <i>Human Development Index⁵</i>	-	63,50	63,89	64,17
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶ <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price⁶</i>	miliar rupiah <i>Billion rupiahs</i>	3 466,7	3 519,3	3 611,2
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ /Economic Growth ⁷	%	5,54	0,89	1,29
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan ⁸ <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Constant Price⁸</i>	miliar rupiah <i>Billion rupiahs</i>	2 247,4	2 267,5	2 296,7
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{9,10} <i>Per Capita of GRDP at Current Price^{9,10}</i>	juta rupiah <i>million rupiahs</i>	12,62	13,73	13,91

Gambar 1. Statistik Kunci, 2019-2021

sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Dari data di atas diketahui bahwa capaian IPM di Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 64,17. Capaian ini dapat dikatakan mendekati target capaian IPM Provinsi NTT tahun 2021 yakni sebesar 65,28. Indikator IPM sendiri terdiri dari sejumlah komponen penyusun, yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Sekalipun demikian, kualitas dan daya saing SDM tidak hanya diukur dari tren positif peningkatan IPM. Jika memperhatikan sejumlah indikator terkait lainnya seperti jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka, maka dapat

disimpulkan bahwa kedua indikator tersebut juga masih mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin juga mencerminkan kualitas dan daya saing SDM serta kualitas dan daya saing daerah. Dengan tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin yang tinggi dapat menghambat investasi dan perkembangan suatu wilayah.

Dalam rangka merespon kenyataan ini, maka terdapat sejumlah usaha yang dilakukan oleh beberapa sektor yang menjadi mitra kerja pemerintah daerah. Salah satunya adalah kegiatan *workshop* “Membangun Manggarai Barat Dari Desa” yang diselenggarakan oleh Politeknik eLBajo Commodus, sebagai perwakilan dari sektor akademisi, pada tanggal 29 Maret 2023. Di dalam *workshop* ini dilaksanakan forum diskusi terpumpun (FGD) dengan tema “Meningkatkan Potensi SDM Desa di Manggarai Barat”. Peserta *workshop* ini adalah para camat dan kepala desa wilayah Manggarai Barat, perwakilan dari pemerintah daerah yang membidangi dan berkoordinasi untuk pengelolaan desa, lembaga pendidikan ditingkat SMA, SMK dan MA, serta perwakilan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Riset ini merupakan analisis dari kesimpulan dan hasil FGD yang diharapkan menjadi panduan untuk usulan dan rencana tindak lanjut, serta optimalisasi program dari pemangku kepentingan terkait demi tercapainya visi dimaksud.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut C. Brobowski, perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu Negara (Azhar, 2022). Jhingan (2000) juga mendefinisikan perencanaan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu, misalnya sosial, politik, atau lainnya, yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Definisi lebih sederhana dikemukakan Friedman (1973) dimana perencanaan adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama.

Sedangkan, Todaro (2000) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan dapat diukur dari berbagai sudut pandang. Contohnya, pembangunan ekonomi yang dapat diukur dari GNP/GDP per kapita atau pembangunan sosial yang dapat diukur dan dikaji berdasarkan tingkat pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut, menurut Widjojo Nitisastro (Kholik, 2020), perencanaan pembangunan berhubungan dengan dua hal, yaitu penentuan pilihan yang dilakukan secara sadar berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat demi tercapainya tujuan-tujuan konkret dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan juga berhubungan dengan pilihan-pilihan terhadap cara-cara

alternatif, efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. UU No. 25 Tahun 2004 juga mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat yang ada di tingkat daerah. Secara konstitusional, terdapat serangkaian undang-undang terkait pemerintahan daerah dimana salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku sampai sekarang.

Di samping itu, dalam pasal 18 UUD Tahun 1945 terdapat penekanan sebagai berikut: “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Sekurang-kurangnya terdapat empat hal yang bisa dijelaskan yakni: pertama, oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga; kedua, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil; ketiga, di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtgmeen schappen*) atau bersifat daerah administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang; keempat, di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari terciptanya sistem perundangan tentang pemerintahan daerah adalah kehendak untuk mengakomodir semangat otonomi daerah guna menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga menandai perubahan praktek ketatanegaraan di era terdahulu yang cenderung sentralistik dan mengabaikan kepentingan daerah.

Desa

Menurut KBBI (2013), desa didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berada diluar kota, tetapi merupakan kesatuan atau kesatuan wilayah, serta dihuni sejumlah keluarga dan juga mempunyai sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan menurut H.A.W. Widjaja (2002), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan dilandasi oleh pemikiran menyangkut keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Secara konstitusional, pengertian desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014, yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan suatu batas wilayah tertentu, dan memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional. Urusan pemerintah di tingkat desa ini juga diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan pemerintahan desa, menurut UU No. 6 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2, dipahami sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan yang dimaksud meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, melalui kepala desa dan perangkat desa, dan bidang legislatif untuk pembuatan kebijakan, melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Nugroho, 2013). Kewenangan desa juga dijabarkan lebih terperinci dalam Permendes No. 1 Tahun 2015, khususnya bab II pasal 2 sampai dengan bab II pasal 14, terkait dengan kewenangan desa, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa desa, serta kewenangan lokal berskala desa.

Sekalipun merupakan dua kesatuan pemerintahan di tingkat bawah, namun terdapat perbedaan status yang cukup jelas antara desa dan kelurahan. Desa adalah suatu badan hukum karena merupakan satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi, sedangkan kelurahan bukan badan hukum karena merupakan satuan pemerintahan administrasi perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Salah satu wujud nyata dari hal ini terdapat dalam proses pemilihan kepala desa dan pembentukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh seluruh warga desa dan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pencalonan, penjaringan dan penyaringan oleh panitia, proses pemungutan suara hingga penetapan. Pembentukan BPD juga berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Selain itu, terdapat juga forum musyawarah desa yang bertujuan untuk membahas hal-hal strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal menyangkut penerapan kedaulatan rakyat ini juga diatur dalam sejumlah pasal dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Daya Manusia

Menurut Sumarsono, sumber daya manusia (SDM) atau human resources memiliki dua pengertian, yaitu usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam keseluruhan proses produksi atau manusia sebagai komponen yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut (Agustin, 2018). Snell dan Morris (2022) dalam buku *managing human resources* juga menyebut bahwa term-term SDM dalam bahasa Inggris seperti *human resources*, *human capital*, *intellectual assets*, dan *talent management* adalah term yang menyiratkan peran penting manusia sebagai penggerak atau pendorong kinerja suatu organisasi, bersama dengan sumber daya lain seperti uang, material dan informasi. Hasibuan (2003) mengartikan SDM sebagai keahlian terpadu yang bersumber dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang, serta menjadi unsur penting dalam berbagai tindakan yang dilakukan. Daya pikir sendiri dipahami sebagai kecerdasan yang dibawa dari lahir sebagai modal dasar dan kecakapan diperoleh melalui proses pendidikan. Adapun daya fisik dipahami sebagai kekuatan dan ketahanan untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dijalankannya (Ningrum, 2016).

Pengembangan SDM adalah upaya untuk mengembangkan potensi SDM dan meningkatkan kualitas SDM. Terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan tersebut, yaitu: meningkatkan kompetensi secara konseptual

dan teknikal, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan status dan karier kerja, meningkatkan pelayanan terhadap klien, meningkatkan aspek etis dan moral, dan meningkatkan kesejahteraan (Ningrum, 2016). Di samping itu pengembangan SDM ini dapat dilakukan baik secara formal maupun informal (Hasibuan, 2007).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menganalisis hasil kegiatan FGD yang diselenggarakan dalam kerangka utama pembangunan daerah dari desa melalui peningkatan SDM. Penelitian ini juga menggunakan sejumlah pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*the statutory approach*), pendekatan konseptual (*the conceptual approach*), dan pendekatan fakta (*the factual approach*). Fokus penelitian adalah rangkuman hasil kegiatan FGD, analisis implementasi kebijakan di tingkat Kabupaten dan Desa, dan analisis rencana tindak lanjut hasil FGD.

Lokasi penelitian adalah kampus Politeknik eLBajo Commodus sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan *workshop*. Data Primer dari penelitian ini adalah rangkuman hasil FGD, hasil observasi lapangan, serta hasil dokumentasi foto dan video. Sedangkan, Data Sekunder diperoleh dari buku dan sumber-sumber lain yang memuat tentang peraturan perundang-undangan, laporan statistik dari BPS Kabupaten Manggarai Barat, serta dokumen atau arsip dari instansi terkait.

Teknik pengumpulan data adalah pengamatan langsung, forum diskusi terpumpun, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan instrumen penelitian ini adalah catatan lapangan, pedoman observasi, pedoman FGD dan alat pendokumentasian seperti perekam suara dan kamera. Analisis data menggunakan empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2009). Analisis data menggunakan teknik analisis SWOT, dimana dengan teknik ini dapat diidentifikasi dan dianalisis kondisi-kondisi yang bersifat internal dan eksternal. Kondisi internal yang dimaksud terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan kondisi eksternal terdiri dari peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*). Analisis matriks dipakai untuk mendapatkan sejumlah strategi umum (*Grand Strategy*) yang merupakan rencana tindak lanjut terhadap hasil FGD tersebut.

Data hasil analisis disajikan secara formal berupa tabel dan informal berupa deskripsi naratif. Pemeriksaan terhadap keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang digunakan untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut (Maleong, 2012:330)

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan yang didalamnya memiliki 164 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Komodo memiliki jumlah desa terbanyak, yakni 15 desa, sedangkan Kecamatan

Boleng dengan jumlah desa paling sedikit, yakni 11 desa. Jumlah sebaran desa setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Kecamatan Subdistrict	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komodo	19	19	19	19	19
Boleng	11	11	11	11	11
Sano Nggoang	15	15	15	15	15
Mbeliling	15	15	15	15	15
Lembor	15	15	15	15	15
Welak	16	16	16	16	16
Lembor Selatan	15	15	15	15	15
Kuwus	22	12	12	12	12
Ndoso	15	15	15	15	15
Kuwus Barat	—	10	10	10	10
Macang Pacar	26	13	13	13	13
Pacar	—	13	13	13	13
Manggarai Barat	169	169	169	169	169

Gambar 2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat 2017-2021
 sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Selanjutnya, prioritas pembangunan desa saat ini menjadi salah satu arah dan prioritas pembangunan negara. Oleh karenanya, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, turut memfasilitasi tercapainya pembangunan desa yang semakin baik dan sejalan dengan target yang ada. Sehubungan dengan ini terdapat 4 program prioritas pemerintah guna mempercepat pembangunan desa, yakni: produk unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES), pembangunan EMBUNG DESA, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa (RAGA DESA). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Kabupaten Manggarai Barat berperan sebagai dinas yang membidangi urusan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, khususnya dalam bidang ekonomi pedesaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan tugas-tugas pembantuan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Seksi Perencanaan Pembangunan Desa, sebagai salah satu seksi di Dinas PMD, memiliki beberapa tugas yang lebih terperinci, yaitu: menyiapkan pedoman dan penyusunan perencanaan pembangunan desa; menyiapkan pedoman teknis penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa); memfasilitasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa); memfasilitasi evaluasi perubahan RKPDesa dan RAPBDesa; melakukan pembinaan dan pengawasan proses perencanaan pembangunan desa; melaksanakan bimbingan teknis perencanaan pembangunan desa; melaksanakan evaluasi RAPBDesa dan perubahan RAPBDesa; melaksanakan pembinaan dan evaluasi

perencanaan pembangunan desa; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan baik dengan pemerintah pusat dan juga sektor publik atau privat yang bekerjasama dalam melakukan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa. Misalnya, di tahun 2022, terdapat Program Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kawasan super prioritas pariwisata nasional. Terdapat dua kepentingan utama yang hendak dicapai disini, yaitu percepatan pembangunan desa wisata melalui pengembangan sarana prasarana pendukung destinasi wisata dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola dan masyarakat melalui penguatan penggunaan sarana prasaran media digital. Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, adalah desa yang mendapatkan program tersebut. Selain itu, terdapat juga program pelatihan desa wisata untuk wilayah kecamatan Lembor dan kecamatan Lembor Selatan yang mencakup desa Poco Rutang, Watu Tiri, Wae Bangka, Daleng, Siru, Benteng Dewa, Pong Majok, dan Ponto Ara.

Program pembangunan desa melalui pengembangan desa wisata adalah salah satu program yang gencar dikembangkan di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan SK Nomor 106/KEP/HK/2021 tanggal 30 April 2021, terdapat 94 desa yang ditetapkan sebagai desa wisata. Data 94 desa wisata dari 169 desa / kelurahan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. 94 Desa Wisata Kabupaten Manggarai Barat

Komodo	Boleng	Sano	Mbeliling	Lembor	Welak	Lembor	Kuwus	Ndoso	Kuwus Barat	Macang	Pacar
		Nggoang			Selatan				Pacar		
Batu Cermin	Tanjung Boleng	Golo Kempo	Compan g Liang Dara	Daleng	Dunta	Benteng Dewa	Bangka Lewat	Golo Bore	Compan g Kules	Bari	Benteng Ndope
Compan g Longgo	Sepang	Golo Kondeng	Cunca Lolos	Golo Ndeweng	Galang	Benteng Tado	Benteng Suru	Golo Keli	Golo Lewe	Lewat	Compan g
Golo Bilas	Pota Wangka	Golo Leleng	Cunca Wulang	Liang Sola	Golo Ndari	Kakor	Coal	Golo Poleng	Golo Riwu	Mbakung	Golo Lajang
Golo Mori	Pontianak	Golo Manting	Golo Damu	Ngancar	Golo Ronggot	Lalong	Compan g Suka	Golo Ru'a	Golo Wedong	Nanga Kantor	Golo Lajang Barat
Golo Pongkor	Mbuit	Golo Mbu	Golo Desat	Poco Deden g	Gurung	Lendong	Golo Pua	Kasong	Kolang	Nanga Kantor Barat	Kombo
Gorontalo	Golo Sepang	Golo Ndaring	Golo Ndoal	Poco Rutang	Lale	Modo	Golo Ru'u	Lumut	Ranggu	Nggilat	Kombo Selatan
Komodo	Golo Nobo	Golo Sengang	Golo Sembea	Pondo	Pengka	Munting	Lawi	Momol	Sompang Kolang	Raba	Kombo Tengah
Labuan Bajo	Golo Lujang	Matawae	Golo Tantong	Pong Majok	Pong Welak	Nanga Bere	Lewur	Ndoso	Tengku	Rego	Loha
Macang Tanggar	Golo Ketak	Nampan g Macing	Golo Kempo	Ponto Ara	Orong	Nanga Lili	Nantal	Pateng Lesuh	Tueng	Rokap	Manong
Nggoran g	Beo Sepang	Poco Golo Kempo	Liang Dara	Siru	Racang Welak	Repi	Pangga	Pong Narang	Wajur	Sarae Naru	Pacar
Pantar	Batu Tiga	Pulau Nuncung	Tandong Belang	Tangge	Rehak	Surunumbeng	Sama	Raka		Watu Manggar	Pong Kolong
Papa Garang		Sanon Nggoang	Tiwu Riwung	Wae Bangka	Robo	Wae Mose	Suka Kiong	Tehong		Watubar u	Roman g
Pasir Panjang		Wae Lolos	Wae Jare	Wae Kanta	Semang	Watu Rambung		Tentang		Wonton g	Waka

Pasir Putih	Wae Sano	Watu Galang	Wae Mowol	Sewar	Watu Tiri	Tundosuro/Tundosoro
Seraya Marannu	Watu Panggal	Watu Wangka	Wae Wako	Watu Umpu	Watu Waja	Wae Buka
Tiwu Nampar Wae Kelambu				Wewa		Waning
Warloka						
Watu Nggelek						

sumber: Olah data, 2023

Kebijakan pembangunan di desa, melalui program desa ini, sejalan dengan sejumlah produk hukum yang telah dikeluarkan sebelumnya, antara lain: Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional yang didalamnya telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Indonesia, 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Indonesia, serta kebijakan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Indonesia, Undang-Undang No. 14 dan No. 23 Tahun 2014, serta Permen No. 3 Tahun 2015.

Diskusi

Kegiatan workshop “Membangun Manggarai Barat Dari Desa” mengundang perwakilan dari sejumlah pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan data undangan dan absensi, peserta yang hadir dan terlibat dalam FGD adalah: Kepala Desa, dengan perincian: Desa Golo Ndering, Desa Pota Wangka, Desa Poco Rutang, Desa Watu Galang, Desa Golo Ketak, Desa Golo Mbu, Desa Loha, Desa Compang, Desa Pontianak, Desa Beo Sepang, Desa Wae Lolos, Desa Golo Pangkar, Desa Todong Belang, Desa Cunca Wulang, Desa Golo Kempo, Desa Siru, Desa Liang Ndara, Desa Cunca Lolos, dan Desa Tiwu Riwuang. Terdapat juga perwakilan dari SMA/SMK/MAN yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dengan perincian: SMA Negeri 1 Komodo, SMA Negeri 2 Komodo, SMA Negeri 3 Komodo, MAN Manggarai Barat, SMK Negeri 3 Komodo, dan SMKN Bina Mandiri.



Gambar 3. Proses FGD yang sedang berlangsung

sumber: Olah data, 2023

Adapun, perwakilan dari pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten dengan perincian sebagai berikut: Setda Kabupaten Manggarai Barat, Dinas PMD (Pemberdayaan Desa dan Masyarakat), Disparekrabud (Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan), BRIDA (Badan Riset Daerah), Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Pacar. Turut diundang juga perwakilan dari dunia usaha dan industri dimana yang hadir adalah Hotel Local Collection dan Restoran Senja Eatery. Terdapat juga perwakilan dari pers atau media, yaitu: NTTNEWS.ID dan INFOKINI.News.



Gambar 4. Foto Bersama Peserta Workshop
 sumber: Olah data, 2023

Partisipasi pemangku kepentingan terkait adalah salah satu faktor penting dalam perencanaan dan pengembangan suatu program. Berdasarkan prinsip keterwakilan maka dapat dilihat bahwa kegiatan workshop ini dihadiri oleh sejumlah besar pemangku kepentingan yang mencakup akademisi, pemerintah, dan sektor privat. Analisis terhadap FGD terangkum dalam matriks berikut:

Tabel 2. Matriks Analisis SWOT

	Kekuatan (<i>Strengths</i>):	Kelemahan (<i>Weakness</i>):
Internal	<p>Potensi alam dan budaya yang khas dan di unik di masing-masing desa</p> <p>Kearifan masyarakat lokal melalui adat istiadat, norma dan hukum adat serta keanekaragaman budaya yang masih terus dipelihara dan sejalan dengan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan</p> <p>Aspek sosial kemasyarakatan seperti keramahmataman, tolerasi dan keamanan yang terus dipelihara dan dilaksanakan oleh masyarakat desa</p> <p>Adanya inisiatif dan keinginan pemangku kepentingan di tingkat desa dan masyarakat untuk memajukan desanya</p>	<p>Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk mengelola desa.</p> <p>Aksesibilitas dan infrastruktur pendukung yang belum terkoneksi secara baik</p> <p>Belum ada pemetaan yang komprehensif terhadap potensi desa yang sangat beragam dan kompleks</p> <p>Masih lemahnya fungsi koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten, khususnya dalam hal pelaksanaan, evaluasi dan pembinaan lanjut terhadap program yang dilaksanakan di desa</p>

<p>Eksternal</p>	<p>Terdapat dukungan masyarakat di desa untuk berpartisipasi dalam program kerja pemerintah daerah dan pusat. Salah satunya adalah penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia dan penetapan 96 Desa Wisata di Manggarai Barat</p>	<p>Produksi dan hasil produk holtikultura yang belum dikelola secara baik sehingga belum maksimal dan dapat memenuhi permintaan pasar</p> <p>Belum maksimalnya alokasi dana desa, APBD dan juga penyerapannya untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama desa</p> <p>Terdapat juga sejumlah persoalan klasik di desa seperti: kasus KKN, tingginya kasus pernikahan anak usia dini, STUNTING, rendahnya tingkat pendidikan dan kasus putus sekolah, kebergantungan masyarakat terhadap anggaran dari pemda, dan masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat</p>
<p>Peluang (<i>Opportunities</i>):</p> <p>Tren pariwisata milenial yang cocok dengan sumber daya alam dan budaya daerah, baik untuk pengembangan dan Kerjasama.</p> <p>Perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan desa melalui APBN dan APBD.</p> <p>Otonomi dan kewenangan desa untuk melakukan intervensi terhadap program pemberdayaan desa yang cukup tinggi.</p> <p>Semakin terbukanya kerjasama dengan pihak eksternal untuk pengelolaan dan pemberdayaan desa.</p> <p>Gencarnya pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat karena statusnya sebagai salah satu DSP Indonesia.</p>	<p>Strategi SO</p> <p>Pengembangan pariwisata tematik seperti <i>rural tourism</i>, <i>sport tourism</i>, <i>cultural tourism</i>, <i>creative millennial tourism</i>, <i>city tourism</i>, dan lainnya.</p> <p>Pendampingan penggunaan dan penyerapan anggaran secara tepat sasaran berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan.</p> <p>Kolaborasi sektor pariwisata yang sejalan dengan sektor utama masyarakat: pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.</p> <p>Kolaborasi desa dan pihak ketiga untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Penguatan koordinasi dan kerjasama serta integrasi data oleh seluruh tim kerja dan pemangku kepentingan terkait mulai dari tingkat kabupaten dan desa.</p>	<p>Strategi WO</p> <p>Peningkatan SDM, khususnya kelompok milenial, melalui pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan untuk peningkatan skill dan keterampilan dan pendampingan rutin.</p> <p>Identifikasi potensi desa wisata secara komprehensif dan berkala sebagai dasar penyusunan program dan evaluasi.</p> <p>Kolaborasi dan kerja sama rantai pasok produk holtikultura antara Desa dengan Dunia Usaha Dunia Industri.</p> <p>Program pendampingan untuk manajemen dan alokasi anggaran secara proporsional dan maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
<p>Tantangan (<i>Threats</i>):</p> <p>Pengembangan pariwisata yang massif berdampak langsung terhadap tingginya beban pemerintah daerah untuk urusan operasional dan pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut.</p> <p>Tergerusnya aspek sosial budaya masyarakat lokal karena cepatnya perkembangan industri.</p> <p>Masuknya tenaga kerja dari luar daerah karena rendahnya tingkat serapan tenaga kerja lokal.</p> <p>Ketidakstabilan rantai pasok antara desa ke sektor industri untuk menjaga kesinambungan pasar.</p> <p>Profil lulusan generasi milenial yang belum sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan industri</p>	<p>Strategi ST</p> <p>Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala serta didukung pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan atau energi terbarukan.</p> <p>Perdes yang mengatur perlindungan dan tata cara pengelolaan aset sosial dan budaya masyarakat setempat.</p> <p>Analisis rantai pasok mulai dari jenis produk dan kapasitas produksi hingga kapasitas permintaan pasar</p> <p>Kerja sama antara PLC dan Desa Wisata dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM Desa.</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Inventarisir dampak-dampak kegiatan pembangunan industri pariwisata guna merumuskan langkah-langkah konkrit untuk pengelolaan yang berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan SDM, khususnya bagi perangkat desa dan pokdarwis di 96 desa wisata, melalui pemberian beasiswa pendidikan, dan pelatihan untuk peningkatan skill atau keterampilan.</p> <p>Program penguatan multiplier effects pariwisata ke desa-desa atau komunitas lokal berdasarkan prinsip pariwisata inklusif, kesetaraan gender dan keadilan sosial, yang mana mencakup juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti hak hidup layak, kesehatan dan Pendidikan.</p>

Berdasarkan matriks SWOT maka dapat dihasilkan sejumlah Rencana Tindak Lanjut (RTA), sebagai berikut: pertama, penyelarasan antara Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Kedua, memaksimalkan pemanfaatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dimiliki oleh pemerintah dan PTV untuk menghasilkan SDM industri dan menjawab tuntutan atau kebutuhan tenaga kerja lokal dalam waktu singkat. Ketiga, mempererat kerjasama dan mitra antara pemerintah desa dan lembaga pendidikan tinggi/vokasi, khususnya dalam hal promosi agar siswa/i dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi vokasi dan juga berkolaborasi dalam hal pengelolaan potensi desa (Desa Binaan). Keempat, pendidikan vokasi menyiapkan program studi yang spesifik, misalnya: program studi tata boga, sebagai pendalaman dari program studi Diploma-IV Pengelolaan Perhotelan dan Diploma-III Perhotelan. Kelima, pemerintah desa bekerja sama dengan pendidikan vokasi menyediakan bantuan atau insentif pendidikan bagi siswa/i asli daerah, baik melalui program seperti beasiswa desa, KIP Kuliah, dan Jalur Prestasi, bagi calon mahasiswa putra/i daerah. Keenam, usulan penyesuaian program studi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan penerimaan formasi Pegawai Negeri Sipil, yang pada akhirnya membuka peluang bagi lulusan untuk dapat bekerja juga di sektor pemerintahan, khususnya di tingkat kabupaten dan desa.

KESIMPULAN

Dewasa ini, peningkatan SDM, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan, menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Indonesia. Lebih dari itu, dengan mengembangkan sisi SDM, maka berdampak pada investasi pembangunan yang bersifat jangka panjang. Pembangunan desa yang berkualitas dan berkelanjutan, baik dari segi alam lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya, dapat tercapai jika investasi SDM (*investing in people*) ini dilaksanakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada panitia Dies Natalis ke-5 Politeknik elBajo Commodus, terkhusus sub seksi *workshop*, yang telah mempercayakan peneliti untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini. Terima kasih berlimpah untuk Ibu Bapak sekalian, narasumber dan perwakilan dari masing-masing pemanku kepentingan terkait, yang sudah hadir dalam kegiatan *workshop* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F. R., Arfianti, D. Y., Nikmah, K., & Muammar, F. (2018). *Ada Apa Dengan Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sidoarjo*.
- Friedmann, John (1973) "Retracking America: A Theory of Transactive Planning," Garden City, NY: Anchor Press.

Hasibuan, Malayu, S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jhingan, ML (2000) "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan," PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.

Ningrum, E. (2016). Pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1).

Nugroho, Setyo. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, no. 2, 2013, doi:10.15408/jch.v1i2.2633.

Snell, S., & Morris, S. (2022). *Managing human resources*. Cengage Learning.

Todaro, Michael (2000) "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga," Edisi Ketujuh, Alih Bahasa: Haris Munandar, Jakarta: Penerbit Erlangga.